**KADERISASI PEREMPUAN PARTAI POLITIK
(Studi Pada Partai Golkar dan PKB Provinsi Riau Tahun 2009-2014)**

Oleh :

Muharni

Email : muharnisitumeang@gmail.com

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Pekanbaru
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas KM. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63272

ABSTRACT

Political parties play a very important role in a democratic system. Political parties are important institutions in efforts to increase women's representation in politics. The low representation of women in politics and the low commitment of political parties in empowering women cadres is an interesting issue to study. This is due to the process of screening, screening and the determination of candidates for political office in the hands of the party. The condition of women's representation in the legislature is inseparable from the internal situation of political parties, especially the issue of recruitment and regeneration.

This study aims to determine the pattern of cadre carried out by the DPD of the Golkar party and the PKB DPW in Riau Province in the period 2009-2014 and to find out the supporting factors and inhibitors of cadre carried out by the two major parties towards internal party cadres, especially for women cadres in an effort to strengthen quality of politics and increasing representation of women in the political world, especially in the legislature. This study uses qualitative research methods with descriptive types of research. This method aims to get a true picture of the implementation of the regeneration function held by the DPD of the Golkar Party and the DPW of the Riau Province National Awakening Party, especially for women cadres. The method used is the interview method, and documentation of the data obtained is analyzed carefully.

The results obtained in this study are 1) There is no specific distinction between recruiting new members and recruitment of legislative candidates conducted both in the Golkar party and PKB for female cadres and male cadres, both of which are open. 2) In terms of regeneration, the Golkar party tends to be more active in carrying out regeneration activities compared to PKB in 2009-2014. 3) To carry out regeneration for women cadres inside the Golkar party formed a wing organization called the Golkar Party Women's Union while PKB formed an Autonomous Agency called Perempuan Bangsa. 4) The main obstacle in this cadre is that the system of the party in question is still not well planned, both regarding cadre and funding instruments so that the impact on the implementation of regeneration is less than optimal.

Keywords: *Women's Cadreization, Political Parties, Legislative*

PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kader perempuan terutama bagi politisi perempuan yang mengikuti pemilihan umum legislatif, sebagai upaya dalam meningkatkan tingkat keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di lembaga legislatif.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik pada era reformasi sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat terutama sejak lahirnya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Partai Politik yang memberikan ruang terbuka bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Tuntutan keterlibatan atau keterwakilan perempuan politik didasari oleh argumen bahwa : pertama, untuk memperjuangkan kepentingan perempuan mempengaruhi kebijakan pemerintah maka harus dimulai dengan duduknya perempuan dalam jabatan politik. Dua, kewajaran keterwakilan perempuan dalam jabatan politik (legislatif dan partai politik) didasari oleh jumlah perempuan yang lebih besar dari jumlah laki-laki.¹

¹ Wan Asrida, Wazni, Chitra Puspita Dewi, 2012, *Gerakan Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004-2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nahkoda

Tabel 1
Jumlah Keterwakilan Perempuan
Dalam DPR RI

Tahun Pemilu	Jumlah Anggota DPR	Anggota DPR Perempuan	Persentase (%)
1971	460	33	7,2
1977	460	34	7,4
1982	500	38	8,3
1987	500	57	11,4
1992	500	61	12,2
1997	500	57	11,4
1999	500	40	8,0
2004	550	62	11,2
2009	560	104	18,6
2014	560	97	17,3

Sumber : *Inter-Parliamentary Union*²

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif tingkat nasional DPR RI mengalami kenaikan di lima periode pemilu berturut-turut yakni mulai dari tahun 1971 hingga tahun 1992, kemudian jumlah ini menurun di dua tahun pemilu berikutnya secara berturut-turut yakni pada tahun 1997 dan tahun 1999. Persentase tertinggi terjadi pada pemilu tahun 2009 yaitu sebanyak 104 orang atau sebesar 18,6 persen namun jumlah ini kembali menurun pada pemilu tahun 2014 sehingga menjadi 97 orang atau sebesar 17,3 persen. Dengan kata lain terjadi penurunan sebanyak 7 orang keterwakilan perempuan atau sebesar 1,3 persen.

² Hafied Cangara, *Komunikasi Politik-Konsep Teori dan Strategi Edisi Revisi 2016*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 326

Tabel 2
Keterwakilan Perempuan Di DPRD
Provinsi Riau

TAHUN	ANGGOTA TERPILIH		JUMLAH	(%)
	LK	PR		
2004-2009	42	3	45	6,60%
2009-2014	45	10	55	18,20%
2014-2019	47	18	65	27,70%
TOTAL	134	31	165	18,80%

Sumber : Data KPU Provinsi Riau

Data diatas merupakan perbandingan jumlah kursi yang diperoleh oleh tujuh partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Riau di tiga periode berturut-turut (Tahun 2004, 2009, dan 2014). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan jumlah kursi yang di peroleh kader perempuan di tiap partai politik masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah kursi yang diperoleh kader laki-laki partai politik

Tabel 3
Tujuh Partai Politik yang Mengikuti Pemilihan Umum Legislatif Di Tiga Periode (Pemilu 2004, 2009, 2014)

NO	NAMA PARTAI	2004-2009		2009-2014		2014-2019	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	PARTAI GOLKAR	15	1	10	5	7	7
2	PPP	7	0	5	1	3	2
3	PAN	6	1	6	0	6	1
4	PDIP	7	0	6	1	7	2
5	PARTAI DEMOKRAT	2	0	6	2	6	3
6	PKS	5	0	5	0	2	1
7	PKB	2	0	3	0	6	0

Sumber : Data Olahan Penulis

terdapat beberapa fenomena-fenomena yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini diantaranya :

1. Persentase keterwakilan perempuan dalam dunia politik terutama dalam lembaga legislatif baik di DPR-RI maupun DPRD Provinsi Riau masih menunjukkan tingkat keterwakilan yang rendah, jika mengacu pada kebijakan kuota 30 persen keterwakilan yang di tetapkan dalam perundang-undangan maka hal ini belum tercapai.
2. Partai Golkar menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan terbanyak untuk kader perempuan yang mengikuti pemilu DPRD Provinsi Riau di tiga periode berturut-turut (2004, 2009, dan 2014) meskipun jumlah kader perempuan yang menjadi DCT tidak berada pada persentase tertinggi di banding partai lainnya yakni hanya mencapai persentase 31,66 persen pada pemilu 2009 dan meningkat menjadi 38,46 persen pada pemilu 2014.
3. Apabila dibandingkan dengan partai lainnya, PKB adalah partai yang memiliki persentase tertinggi untuk keterwakilan perempuan yang menjadi DCT yaitu sebesar 36,73 persen pada pemilu 2009 dan meningkat

menjadi 41,53 persen pada pemilu 2014, namun jumlah ini tidak sejalan dengan jumlah perolehan kursi kader perempuan PKB yang tidak berhasil memperoleh kemenangan sama sekali di tiga periode berturut-turut.

Hal ini menimbulkan persoalan baru apakah dengan diberlakukannya sistem kuota 30 persen bagi politisi perempuan dapat menjamin hak-hak politik yang diperoleh oleh para politisi perempuan dapat terpenuhi. Sistem kuota justru menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kaum perempuan yang terjun ke dunia politik terkait kesiapan para kader-kader perempuan terpilih tersebut dalam menghadapi persaingan meraih kursi baik persaingan dengan sesama kader perempuan maupun kader laki-laki.

Rekrutmen politik dan kaderisasi menjadi dua agenda penting bagi partai politik. Proses rekrutmen partai merupakan modal dasar bagi partai politik untuk menempatkan kader-kadernya dalam jabatan politik itu, idealnya suatu partai politik melakukan rekrutmen kader dan calon anggota legislatif jauh-jauh hari sebelum helat politik dilangsungkan.

Tujuannya sederhana yaitu mempersiapkan kader-kader rekrutan tersebut dengan kemampuan yang mempunyai untuk bersaing dengan kader-kader politik dari partai lain dan memiliki kemampuan dalam hal

pelaksanaan tugas dan kewajiban ketika terpilih dalam kompetisi politik tersebut. Sementara kaderisasi adalah bagian dari proses rekrutmen dimana adanya proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi partai secara lebih baik dan kaderisasi ini dilakukan secara berjenjang dan sistematis.

Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, identifikasi masalah, serta batasan masalah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana mekanisme kaderisasi perempuan yang dilakukan oleh partai Golkar dan PKB Provinsi Riau Tahun 2009-2014?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar dan PKB Provinsi Riau Tahun 2009-2014?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme kaderisasi perempuan yang dilakukan oleh partai Golkar dan PKB Provinsi Riau Tahun 2009-2014.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kaderisasi perempuan yang dilakukan

oleh partai Golkar dan PKB Provinsi Riau Tahun 2009-2014.

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penulis karya ilmiah dalam departemen ilmu politik terutama terhadap perkembangan kaderisasi perempuan oleh partai politik di Indonesia.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan maupun tujuan praktis.

KERANGKA TEORI

1. Feminsme Dalam Politik³

Sejak awal kelahirannya, feminisme bersifat politik. Namun, feminisme bukanlah suatu pendekatan yang tumbuh di dalam batas-batas ilmu sosial. Ia berasal dari luar akademis sebagai ideologi gerakan sosial yang kritis dan mengacaukan.

³ David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 130-136

Seperti kebanyakan fenomena sosial yang lain, feminisme sulit untuk didefinisikan, apalagi memberikan suatu definisi yang disepakati. Mungkin pendekatan yang terbaik terhadap pendefinisian adalah yang bersifat historis. Feminisme muncul sebagai suatu gerakan atau himpunan gagasan yang ditujukan untuk meningkatkan status dan kekuasaan perempuan.

Namun, sejak dari permulaan, feminis berbeda-beda berdasarkan alasan yang mereka ajukan tentang adanya ketidaksetaraan, dalam cara mereka membingkai tujuan mereka, dan strategi yang mereka pilih untuk mewujudkannya. Feminisme terbagi kedalam beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Feminisme liberal
- b. Feminisme marxis
- c. Feminisme radikal
- d. Feminisme postkolonial
- e. Feminisme sosialis

2. Kaderisasi

Kaderisasi secara terminologi dapat diartikan sebagai proses pencetakan kader. Kaderisasi berasal dari kata “kader” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang diharapkan atau dipersiapkan untuk dapat memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai, dan sebagainya.

Kaderisasi adalah proses pencarian bibit-bibit unggul dari anggota partai politik melalui kegiatan sistematis, berkelanjutan dan terarah

berkaitan dengan senang hati akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi.⁴

3. Kegagalan Kaderisasi

Komitmen untuk melaksanakan kaderisasi tidak cukup hanya dengan mencantulkannya di dalam AD/ART partai politik saja. Tetapi juga harus diterjemahkan dalam program-program partai secara berjenjang di setiap tingkatan kepengurusan dan juga dilaksanakan secara berkala.

Beberapa faktor kegagalan kaderisasi :

1. Pelembagaan politik yang tidak sempurna. Pelembagaan politik dapat dilihat melalui beberapa aspek, diantaranya : 1) Dimensi kesisteman, 2) Dimensi identitas nilai, 3) Dimensi Otonomi, dan 4) Dimensi Citra Publik. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari lemahnya pelembagaan partai politik : pengkubuan dan menguatnya pragmatisme, kepentingan figur diatas kepentingan partai, serta perbedaan terhadap pemahaman atas ideologi partai.
2. Terbatasnya dana yang dimiliki partai politik untuk melaksanakan kegiatan kaderisasi.
3. Latar belakang pendidikan kader.

4. Materi dan perencanaan pendidikan kader yang kurang optimal.
5. Lemahnya metode evaluasi kaderisasi.

4. Keberhasilan Kaderisasi

Kaderisasi dapat dikatakan berhasil apabila organisasi partai politik dapat mendesain sistem di internal partai secara terencana dan terbuka. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain kaderisasi dalam partai politik agar berjalan dengan baik yakni : pertama, menentukan relasi dalam kaderisasi politik, dan kedua yaitu menyusun rencana kaderisasi partai politik.⁵

5. Program-program kaderisasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Ketiga Tipe ini meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.

Definisi Konseptual

1. Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara menanamkan nilai-nilai tertentu, sehingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang berkualitas.

⁴ Jaka Triwidaryanta dkk, *Modul Pengkaderan Partai Politik*, (Yogyakarta: Strategic Transformation Institute, 2008) hlm.13

⁵ Tri Wahyu Budi Setiawan, *Proses Kaderisasi Partai Gerindra Di Kota Malang*, (Skripsi, 2015, Universitas Brawijaya)

2. Partai politik merupakan sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri.
3. Affirmative action (Tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang memberikan keistimewaan (kepada kelompok tertentu) salah satunya kelompok perempuan, demi mencapai tujuan tertentu.
4. Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.
5. Pemilu legislatif adalah proses pemungutan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mekanisme pemilihannya diatur dalam undang-undang.
6. Konsolidasi adalah kegiatan partai dalam memantapkan pemahaman dan solidaritas anggota partai secara padu untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Kader partai adalah kumpulan orang yang dibina oleh organisasi politik dengan harapan kader tersebut kelak dapat meneruskan kepengurusan atau kepemimpinan organisasi.
8. Calon legislatif (Caleg) adalah kandidat yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif baik ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
9. Daftar calon tetap (DCT) adalah daftar kandidat anggota legislatif yang akan dipilih pada tingkat Pusat, Daerah, dan DPD.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis Data

- a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau sumber langsung di lapangan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan penelitian tentang pelaksanaan kaderisasi perempuan oleh partai politik di Provinsi Riau, dalam hal ini terhadap partai Golkar dan PKB Provinsi Riau.
- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang sudah diolah dan diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Riau, kantor DPRD Provinsi Riau, DPD I Golkar Riau, DPW PKB Provinsi Riau, serta sumber bacaan lain seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, media massa, media elektronik, dan media lainnya yang dapat menunjang kelengkapan informasi maupun data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Penarikan kesimpulan

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Riau dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Riau.

Informan Penelitian

Didalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil

penelitian, maka pemilihan informan merupakan orang-orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Staff/Pegawai Kantor Sekretariat partai Golkar dan PKB Provinsi Riau, Kader partai serta pengurus partai Golkar dan PKB Provinsi Riau.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Fungsi kaderisasi partai politik di Provinsi Riau :

Melakukan rekrutmen anggota baru.

Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau sifat. Terdapat dua cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sebaliknya, rekrutmen politik tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa.⁶

⁶ Lili Romli, *Demokrasi Dalam Bayang-bayang Kekuatan Jawara: Studi Kasus Pencalonan Caleg Di Provinsi Banten 2004*, (Jakarta: LIPI, 2005), hlm. 19

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari kedua partai, diperoleh informasi bahwa baik di partai Golkar maupun PKB sama-sama menggunakan sistem rekrutmen terbuka baik dalam merekrut anggota baru maupun rekrutmen calon anggota legislatif.

Menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota.

Kaderisasi dalam tubuh partai politik terdapat beberapa variasi. Ada organisasi yang mendudukan kadernya sesuai nilai dan mekanisme organisasi dengan urutan senioritas dan lamanya mengabdikan pada partai, terdapat juga partai yang sama sekali merekrut orang baru dengan pertimbangan keturunan dari orang terkenal, mempunyai akses dan sumber daya yang besar yang nantinya dapat menjadi *vote getter* dalam pemilu.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan jika pembinaan yang dilakukan oleh partai Golkar lebih memiliki mekanisme pengkaderan yang lebih baku serta aktif baik kegiatan kaderisasi umum maupun kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi sayap yang khusus menaungi kader perempuan partai. Selain itu, komitmen partai Golkar dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan partai terlihat dari persentase perempuan yang menduduki posisi strategis baik

dalam kepengurusan partai maupun di struktur lembaga legislatif itu sendiri.

Menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota.

Berdasarkan undang-undang terdapat tiga sumber pendanaan partai politik yang diperbolehkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 34. Sumber keuangan partai tersebut yaitu, **Pertama**, bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. **Kedua**, Iuran anggota partai politik, **Ketiga**, sumbangan yang sah menurut hukum baik perorangan maupun badan usaha mengikuti ketentuan perundangan. Setiap tahun pemerintah daerah Provinsi Riau, melalui APBD memberikan subsidi kepada partai politik. Penentuan besaran bantuan partai politik yang bersumber dari APBD dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh partai yang mendapatkan kursi di DPRD. Berikut ini adalah jumlah alokasi dana yang diperoleh partai Golkar dan PKB Provinsi Riau pada tahun 2012-2015 :

Tabel 4
Penerimaan Partai Golkar dan PKB dari Bantuan APBD Provinsi Riau Tahun 2012-2015

Nama Parpol	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
Golkar	302,724,375	302,724,375	324,157,500
PKB	48,889,375	48,889,375	71,173,124

Sumber : LHP BPK Perwakilan Riau atas LKPD Prov. Riau 2013 dan 2014.⁸

⁷ Redatin Parwadi, *Kaderisasi Organisasi Dalam Perubahan*, (Jurnal Wawasan, Juni 2006, Volume 12, Nomor 1, FISIP Universitas Tanjungpura), hlm.9

⁸ Dikutip dari Triono hadi dan Tarmizi, *Potret Pengelolaan Keuangan Partai Politik Riau*

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa jumlah penerimaan partai Golkar jauh lebih besar dibandingkan jumlah dana yang diterima oleh PKB di setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan perolehan suara dan kursi yang diraih oleh Golkar dan PKB pada pemilu legislatif Provinsi Riau sebelumnya. Dimana pada pemilu 2004-2009 partai Golkar meraih 16 kursi di DPRD Provinsi Riau, sementara PKB hanya meraih 2 kursi Di DPRD Provinsi Riau. Banyaknya program dan kegiatan partai politik, tentunya diikuti dengan pembiayaan yang besar pula, untuk itu dipastikan partai politik di Provinsi Riau mengelola keuangan yang cukup besar pula setiap tahunnya.

Mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi.

Tidak mungkin sebuah organisasi sama sekali tidak melakukan pengawasan dalam arti seluas-luasnya. Pengawasan itu penting agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dalam proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.⁹ Evaluasi yang efektif perlu diterapkan untuk memperbaiki sistem pengkaderan kedepan. Untuk evaluasi dan mekanisme kontrol dalam pelaksanaan kaderisasi partai Golkar membentuk lembaga yang disebut LPK (lembaga pelaksana kaderisasi)

Hasil Investigasi dan Akses Informasi Publik, (Fitra Riau-Indonesia Corruption Watch, 2015), hlm. 13

⁹ Dra Setyowati, M.Si, *Organisasi dan Kepemimpinan Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 151

sementara di PKB dibentuk badan yang disebut Desk Kaderisasi.

Faktor Pendukung dan penghambat kaderisasi perempuan oleh partai politik.

- a. Faktor Pendukung Pelaksanaan kaderisasi :
 1. Solidaritas antar kader partai politik..
Kerjasama antar kader partai politik dimaknai sebagai upaya membangun ikatan solidaritas antar anggota, karena adanya sebuah ikatan mengenai perjuangan serta visi dan misi yang sama, ikatan solidaritas bisa dibangun secara lebih konkrit.
 2. Solidnya pengurus partai politik
Pembagian jabatan dalam tubuh partai didasarkan bukan hanya dari segi kemampuan akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman dan masa jabatan. Organisasi yang ditata dengan baik dan terbuka menjadikan struktur bagian kepengurusan partai berfungsi dengan baik dan maksimal dibidang pengkaderan.
 3. Partisipasi Kader
Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan dapat direalisasikan, adanya kesadaran diri pada setiap kader untuk selalu ingin turut

andil dalam membesarkan dan memperjuangkan konsistensi partai.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kaderisasi :

1. Alokasi Waktu dan Pendanaan. Masalah utama dalam pengkaderan adalah tidak adanya perencanaan yang matang secara detail, terutama dalam hal waktu pelaksanaan sehingga program-program yang sebelumnya sudah dirancang tidak dapat terlaksana seluruhnya, bahkan selama ini pengkaderan dilakukan hanya beberapa waktu sebelum dilaksanakannya pemilu. Selain itu tidak ada dana yang tidak memadai membuat program pengkaderan tidak dapat dilaksanakan secara berkala.
2. Sistem kaderisasi dan kelembagaan Hal ini berkaitan dengan perencanaan pengkaderan yang kurang optimal serta lemahnya sistem database seluruh anggota dan kader. Ketidakmatangan perencanaan terlihat dari berbagai penyelenggaraan diklat di berbagai jenjang tidak optimal. Sistem dan database yang dipakai selama ini untuk keperluan pembinaan, monitoring evaluasi kader, serta pertukaran informasi antar kader belum diolah secara periodik, akibatnya sulit untuk mengetahui siapa saja kader-kader berprestasi di wilayahnya sesuai dengan klasifikasi dan kategori tertentu.

3. Instrumen pengkaderan yang belum tepat sementara untuk materi pengkaderan sendiri lebih banyak membahas mengenai ideologi partai karena nara sumber lebih sering diambil dari internal partai yang bersangkutan. Untuk itu penanggung jawab dan pelaksana pengkaderan yang akan datang harus mampu membuat perencanaan rekrutmen narasumber dan instruktur secara lebih cermat dengan melibatkan sumber-sumber yang lebih luas dan berbagai materi yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh peserta diklat.
4. Kurang berfungsi nya sayap partai yang mewadahi kelompok perempuan. Selama ini kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik diperuntukkan secara umum, tidak ada perbedaan antara pengkaderan yang dilakukan baik untuk kader perempuan dan kader laki-laki. Untuk itu sudah menjadi tugas utama bagi sayap partai sebagai wadah pengkaderan yang khusus diperuntukkan bagi kader perempuan harus lebih merumuskan agenda-agenda kedepan yang lebih efektif guna menghadapi pemilu, selama ini kegiatan lebih banyak menyangkut pendekatan secara internal antar kader perempuan saja, sosialisasi dan pengenalan ke masyarakat masih belum berjalan.

5. Latar belakang pendidikan kader.
Tidak terkoneksi caleg perempuan sebenarnya terkait erat dengan pendidikan mereka yang juga terbatas. Latar belakang sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohan, merupakan modal sosial yang sangat diperlukan sehubungan dengan membangun relasi terhadap masyarakat maupun sesama kader perempuan

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Sistem rekrutmen yang telah diterapkan oleh kedua partai sudah memiliki aturan yang baku yang mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Mekanisme rekrutmen ini kemudian dipertegas kembali kedalam platform partai politik itu sendiri baik melalui AD/ART partai, peraturan partai dan peraturan lainnya. Dalam pelaksanaannya rekrutmen yang ditetapkan oleh Golkar maupun PKB sama-sama menggunakan sistem rekrutmen terbuka baik dalam merekrut anggota baru maupun rekrutmen caleg.
2. Untuk mekanisme perekrutan calon legislatif baik partai Golkar maupun PKB tidak ada perbedaan dalam merekrut

caleg laki-laki dan caleg perempuan, setiap caleg wajib mengikuti tahapan penjurangan, penyaringan dan penetapan yang sudah diatur berdasarkan peraturan partai. Partai Golkar lebih mengutamakan kader perempuan yang bersumber dari internal partai seperti pengurus partai dan juga dari organisasi sayap partai yang disebut KPPG, penilaian kader juga dilakukan dengan sistem skoring, sementara di partai PKB perekrutan calon diluar kader yang memiliki kemampuan finansial dan basis massa masih terjadi, rendahnya minat kader untuk mencalonkan diri membuat partai harus merekrut kader perempuan dari luar partai.

3. Terkait pembinaan dan pengembangan anggota, kegiatan pengkaderan yang dilaksanakan oleh kedua partai tersebut pada tahun 2009-2014, partai Golkar memiliki intensitas pengkaderan yang lebih aktif jika dibandingkan dengan PKB. Partai Golkar melaksanakan 4 kegiatan pengkaderan sementara PKB hanya melaksanakan 2 kegiatan pengkaderan dalam rentan waktu 2009-2014 untuk tingkat Provinsi.
4. Bentuk pembinaan yang dilakukan kedua partai tersebut, baik Golkar maupun PKB sama-sama menggunakan pola pengkaderan secara umum. Tidak ada pemisahan antara program pengkaderan bagi perempuan dan juga laki-

laki. Untuk kaderisasi perempuan dilaksanakan terpisah oleh sayap partai, dalam hal ini organisasi sayap KPPG yang dimiliki Golkar lebih memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang dibutuhkan kader perempuan Golkar kedepannya, sementara badan otonom PB dari PKB masih bergerak dalam penguatan antar kader perempuan saja.

5. Dalam pelaksanaan kaderisasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama dari segi pendanaan dan juga instrumen pengkaderan. Kaderisasi yang dilaksanakan oleh PKB terbilang pasif karena tidak adanya gedung dan minimnya sumber keuangan partai untuk melakukan kegiatan kaderisasi menjadi faktor utama, selain itu sistem data base sumber daya kader yang tidak diperbaharui secara berkala membuat partai kesulitan menentukan kader-kader potensialnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT Tarsito
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik Teori dan Strategi Edisi Revisi 2016*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Karyadi. 2003. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Kaelan, M.S. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marijan, Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media
- Moelong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Ndraha, Taliziduhu. 2006. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta

- Romli,Lili.2005.*Demokrasi Bayang-bayang Kekuatan Jawara:Studi Kasus Pencalonan Caleg di Provinsi Banten 2004*.Jakarta: LIPI
- Soeroto.2006.*Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*.Yogyakarta: Gajahmada Press
- Subagyo,P.Joko.2006.*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*.Jakarta: PT Rineka Cipta
- Surbakti,Ramlan.2010.*Memahami Ilmu Politik*.Jakarta: PT Grasindo
- Thoha,Miftah.1977.*Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.2010.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka
- Jurnal dan Skripsi**
- Al Rafni,Suryanef.2005.*Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Dalam Pemilu 1999 di Kota Padang*.Jurnal Demokrasi Vol.IV No.1
- Firman Noor,MA.2015.*PKB Kegagalan Pelembagaan Share Values dan Dampaknya*.Jurnal Penelitian Politik Vol.12 No.2
- Friscilia,Maya.2013.*Dinamika Konflik Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2013-2015 Di Provinsi Riau*.Jurnal Ilmu Pemerintahan: Universitas Riau
- Hasanudin,Adli.2015.*Pelaksanaan Kaderisasi Partai Golkar Di Kota Pekanbaru 2011-2013*.Skripsi Ilmu Pemerintahan: Universitas Riau
- Parwadi,Redatin.2006.*Kaderisasi Organisasi Dalam Perubahan*.Jurnal Wawasan Vol.12 No.1 FISIP: Universitas Tanjungpura
- Rizki Khoiruly,dkk.2013.*Sistem Kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Kendal Era Reformasi (Studi Oligarki Di Kabupaten Kendal)*.Jurnal Ilmu Pemerintahan Kabupaten: Universitas Diponegoro
- Rodiyah,Isnaini.2013.*Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.Jurnal JKPM Vol.1 No.1: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Rofieq,Ainur.2011.*Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa*.Jurnal Governance Vol.1 No.1: Universitas Islam 45 Bekasi
- Setiawan,Tri Wahyu Budi.2015.*Proses Kaderisasi Partai Gerindra Di Kota Malang*.Skripsi Ilmu Pemerintahan: Universitas Brawijaya
- Yulianto,Dwi Sapto.2015.*Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik*

*Wilayah (Studi di DPD II Partai Golkar Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014).*Jurnal Ketahanan Nasional XXI: Universitas Gajahmada

Wan Asrida,dkk.2012.*Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan.*Jurnal Ilmu Pemerintahan Nahkoda Vol.11 No.17

Undang-Undang :

Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Sumber lainnya :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golongan Karya (Golkar)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Surat Keputusan Nomor 1433/DPP-02/IV/A.I/IX/2006 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Riau Tahun 2006-2011

Surat Keputusan Nomor 12370/DPP-03/IV/A.I/I/2013 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Riau Tahun 2011-2016

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-20/DPP/GOLKAR/I/2005 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Riau Masa Bakti 2004-2009

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-215/DPP/GOLKAR/XI/2012 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Riau Masa Bakti 2012-2015 (Hasli Musdalub)

Kompasiana.30 April 2013.Mengenai Kaderisasi.Diakses dari http://www.kompasiana.com/qorirakhmawati/mengenai_kaderisasi,pada 2 september 2017 Pukul 15.00